



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/207 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI PAPUA
TENGAH TAHUN 2025-2029

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 untuk dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 22);
11. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN: .../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 15 Agustus 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/207 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
PAPUA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/57
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI
PAPUA TENGAH TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PENANGGUNG JAWAB	:	Sekretaris Daerah
KETUA	:	Kepala Bapperida
WAKIL KETUA	:	Septian M. Pasaribu, S.STP., M.I.P.
POKJA I (SOSIAL DAN BUDAYA)	:	<ol style="list-style-type: none">1. Marthen George Erari, S.KM., M.Ec.Dev.2. Inspektur3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak7. Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung8. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana9. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif10. Sekretaris MRP-PPT11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah12. Kepala Biro Hukum13. Kepala Bagian Perundang-Undangan Provinsi14. Kasubbag Penyusun Produk Hukum Penetapan15. Kasubbag Penyusun Produk Hukum Pengaturan Perdasus dan Perdasi16. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan17. Kasubbag Penyusun Program dan Anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana18. Kasubbag Penysusunan Program dan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak19. Kasubbag Program Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung20. Kasubbag Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

21. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
22. Kasubbag Program, Pelaporan, dan Keuangan Inspektorat
23. Kasubbag Program, Anggaran dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24. Kasubbag Program dan Keuangan Sekretariat DPRPT
25. Yelly Telenggen, S.Sos.
26. Feniks Melvi Kareni, S.IP.
27. Dekta, S.Sos., M.AP.
28. Apolos Izaak Wambrauw, S.Hut., M.Eng.
29. Ayu Sultary, S.Pi.
30. Jemmy Gerson Adii, S.E.
31. Herlin Monalisa A.D. Mansawan, S.H.
32. Arnold Asmuruf, S.E., M.Si.
33. Anita Anike Jitmau, S.E.
34. Zakaria Kalalembang, S.Sos.
35. Michael Zonggonauw, S.E.
36. Pasang Tangke
37. Stepen H. Soleman, S.E.
38. Anance Melanesia Sapari, S.T.

POKJA II (EKONOMI)

- :
1. Eddy Lukman Syafiuddin, S.Hut., M.I.P.
 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 5. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan
 6. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
 7. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sumber Daya Mineral
 8. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
 9. Kasubbag Program Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
 10. Ivanda Piter, S.STP.
 11. Irianto, S.T.
 12. Edmound Izaak Syaranamual, S.E.
 13. Alvian Nipi, S.T.
 14. Agus Korinus Kadiwaru, S.IP.
 15. Butet F.Hotmaida Manurung, S.P., M.M.
 16. Bay Pop A. Kobogau, S.E.
 17. Henok Madai, S.Tr.IP.
 18. Irvan R. Sapulete, S.STP.
 19. Daniel Parrang Rupang, S.E.
 20. Ishak Y. Saflembolo, S.STP.

POKJA III
(FISIK DAN PRASARANA)

21. Sani Lolo Lembang, S.T., M.M.
 22. Valentino Mikael Tebai, S.Tr.I.P.
 23. Harry Anto Massarang, S.T.
 24. Syalomita Ezra Rumbiak, S.Tr.I.P.
 25. Yerry Fernando Rumbaibab
 26. Freesan Marvin Ansanay, S.Ip.
 27. Akuila Nanthi, A.Md.Tek.
 28. Hengki Albertus Badidaga, S.M.
 29. Paskalina Lili Sayori, S.Si.
 30. Yulian Degey, S.IP.
 31. Petronela Mote, S.M.
 32. Alfredo Juneidy Imbir, S.Sos.
 33. Fidelis Piligame, S.Sos.
 34. Achmad Santoso
 35. Muhammad Yusuf
 36. Hans Aninam
- :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 2. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
 4. Kepala Dinas Perhubungan
 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
 6. Kasubbag Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 7. Kasubbag Penyusunan Program Dinas Pemadm Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja
 8. Kasubbag Program Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
 9. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan
 10. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 11. Marinus D. Malondong, S.T.
 12. Suwignyo, S.Sos., M.H.
 13. Mike A Elais Watory, S.E.
 14. Catur Mahendra Nugraha, S.T.
 15. Lorensius Patulak, S.T.
 16. Hendarto, S.STP.
 17. Akuila Nanthi, A.Md. Tek.
 18. Mickael Alexander Kadepa, S.Tr.,IP.
 19. Justinus Julianus Maryen, S.T.
 20. Seminus Enumbi, S.STP.
 21. Kent Sroyer, S.T.
 22. Calvin Sada, S.Tr.IP.
 23. Tirsia Theo Paliling, S.Ak.
 24. Prinarto
 25. Beny Kogoya Wonda, S.Sos.
 26. Darians Iyowaw, S.E.
 27. Marlince Manuaron, S.IP.
 28. Loami Gobay, S.Si.
 29. Yance Trifika S. Yoweni, S.M.

30. Cindy Christy Kaempe, S.Ak.
31. Roberto Citra, S.T.
32. Christover M. Boy Rapamy, S.M.
33. Jhony Yunus Tagi, S.Sos
34. Alpon Petrus Edowai, S.M.
35. Efraim Patalaa, S.M.
36. Yerry Fernando Rumbaibab

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002